

## RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Itjen Kemenkeu). Penelitian ini mengambil judul “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual dan mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu.

Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual, penelitian ini menggunakan teori implementasi (Edward III, 1980). Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu, penelitian ini membandingkannya dengan PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, serta wawancara terhadap sepuluh orang informan yang merupakan pembina, pengawas internal, pejabat, dan pelaksana kebijakan di lingkungan Itjen Kemenkeu. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara naratif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang direkomendasikan oleh Creswell (2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kesiapan Itjen Kemenkeu dalam menerapkan sistem akuntansi akrual sudah bagus, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, komitmen organisasi, dan struktur birokrasi. Sebagaimana yang dinyatakan Edward III (1980), keempat aspek tersebut akan mempengaruhi tingkat implementasi suatu kebijakan. Terkait dengan hal itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual di Itjen Kemenkeu sudah dilakukan dengan sangat memuaskan, yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 93,40%.

Implikasi dari penelitian ini adalah Itjen Kemenkeu perlu mengevaluasi kebijakan SDM-nya, membuat *policy recommendation* atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013, dan memberikan masukan kepada DJPB untuk melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN. Selain itu, dengan nilai penerapan sebesar 93,40%, Itjen Kemenkeu dapat dijadikan *benchmark* penerapan akuntansi berbasis akrual bagi unit Eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga yang lain.

Kata kunci: SAP berbasis akrual, implementasi, teori implementasi, kebijakan akuntansi pemerintah pusat.

## SUMMARY

*This study is a qualitative research on the implementation of the Accrual Based Government Accounting System in the Inspectorate General of Ministry of Finance. The title of this study is "Analysis of the Implementation of Accrual Based Accounting on Inspectorate General of Ministry of Finance". The purpose of this study is to find how the Accrual Based Government Accounting System was prepared and implemented in the institution.*

*This study use implementation theory by Edward III (1980) to find how readiness of Inspectorate General of Ministry of Finance in implementing accrual accounting system. Meanwhile, to find out how the implementation of accrual accounting system in the Inspectorate General of Ministry of Finance, this study is compared based on PMK No. 219/PMK.05/2013.*

*Data was collected through observation, study of literature, and interviews with ten participants who have been involved in the implementation of the Accrual Based Government Accounting System in the Inspectorate General of the Ministry of Finance. Then the data were analyzed and interpreted narratively that are recommended by Creswell (2012).*

*In generally, this study found that the readiness of Inspectorate General of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting system was good, either from the communication aspect, resource aspect, organizational commitment aspect, and bureaucratic structure aspect. As stated by Edward III (1980), the fourth aspect will affect the implementation of a policy. So that, this study concluded that the implementation of accrual accounting system in the institution is well performed, that has scored 93,40%.*

*The implication of this study is Inspectorate General of Ministry of Finance have to evaluate its human resource policy, make policy recommendation to modify PMK No. 219/PMK.05/2013, and encourage DJPB to update SIMAK BMN. In addition, with scored 93,40%, Inspectorate General of Ministry of Finance can be used as a benchmark for the implementation of accrual accounting in another institution.*

*Key words: accrual basis of GAS, implementation, implementation theory, accounting policy of central government*